

## **Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu**

**Chinda Aqhni Adisi**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi penulis: [cinda4802@email.com](mailto:cinda4802@email.com)

**Abdul Sadad**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

***Abstract.** The regional government information system or SIPD is an information system used by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) as a system that documents, administers, and processes regional development data into information that is presented to the public and as material for decision making. This study uses qualitative methods with data collection techniques used are primary and secondary data originating from observations, interviews, documentation which were analyzed by researchers so as to obtain accurate and clear data regarding. The result of this research is that the SIPD program at BPKAD has been quite effective. The inhibiting factor found was that there were still network errors, unable to create templates so that the use of SIPD at BPKAD was still using a companion application which was measured from indicators of program understanding, right on target, on time, achieving goals and real changes.*

***Keywords :** Effectiveness, Program, SIPD*

**Abstrak.** Sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas mengenai. Hasil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif. Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringan, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

**Kata kunci:** Efektivitas, Program, SIPD

## **LATAR BELAKANG**

Era globalisasi ini pentingnya sistem informasi manajemen dalam menghadapi perkembangan pengetahuan teknologi yang semakin maju dan meningkat sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia, perkembangan ini ditandai dengan munculnya inovasi yang mempermudah kebutuhan manusia, internet menjadi salah satu teknologi yang sangat diandalkan saat ini dan menjadi faktor yang mempermudah seorang pemimpin memperoleh informasi terbaru. Sistem informasi manajemen merupakan alat yang mampu mengolah informasi dari berbagai sumber. Sistem informasi manajemen adalah sarana penyebaran sebuah informasi yang mampu mencapai seluruh lini dengan syarat penerima informasi mampu untuk mengaksesnya. Noerlina (2011: 118).

Pemerintah akan terus berupaya dalam meningkatkan program di segala aspek sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara nyata dan sempurna dalam pelayanannya kepada masyarakat, dengan perkembangan pengetahuan teknologi. Kemendagri dalam upaya dalam meningkatkan program pemerintah meluncurkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif dan cepat pada 14 Oktober 2019. SIPD ini memuat mengenai sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintah daerah lainnya seperti sistem pembinaan dan pengawasan daerah.

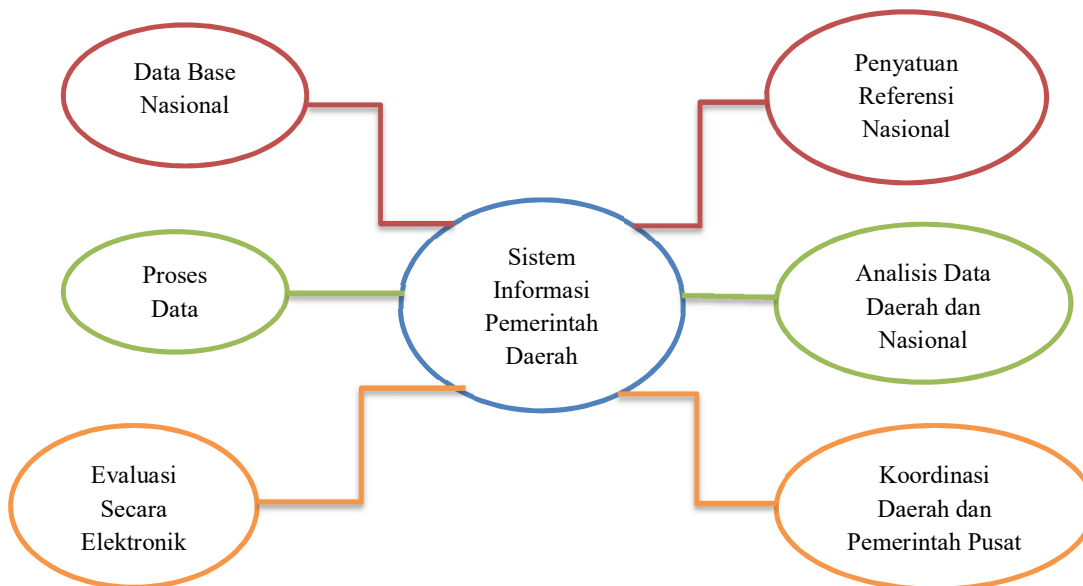
Dalam Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintahan di Indonesia, namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat, berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa masalah yaitu, karena pada tahun sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Indragiri Hulu masih memakai Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIMAKDA) dan itu tidak ada terjadi kendala dalam pemakaiannya, akan tetapi pada awal tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh OPD menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang tertuang dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang “Sistem Informasi Pemerintah Daerah” Oleh

karena adanya Pemendagri ini maka dalam proses pengelolaan keuangan daerah juga harus berubah seperti yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Tata Keola Keuangan dari Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di pasal 222 membahas mengenai pemerintah daerah wajib menerapkan SIPD di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

**Gambar 1.1 Tampilan Awal Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).**



**Gambar 1.2 muatan fungsi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)**



Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri (2020)

Kemudian sulit akses ke server yang masih sering eror, masih terdapat penggunaan aplikasi pendamping dalam pelaksanaannya, serta masih banyak perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah khususnya dalam sistem keuangan daerah bidang penatausahaan karena kendala ini yang menjadikan terhambatnya pembayaran gaji pegawai sebagai salah satu sasaran dari program SIPD ini. Dengan adanya fenomena ini maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara jelas bagaimana dan kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indragiri Hulu, maka peneliti mengambil judul “ Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu ”

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut amstrong (2009:17) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang bekerja dan dikelola dalam organisasi, mencakup perencanaan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, manusia selalu berperan aktif dan selalu dominan dalam setiap aktifitas organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, sekaligus penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **B. Efektivitas**

Siagian (2000:24) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut Sutrisno (2007:125) mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu melihat bagaimana suatu program dapat membuat pihak yang terlibat mampu mengetahui tugas dan tanggungjawabnya serta memahami maksud dari program yang akan dilaksanakan, dalam hal ini dibutuhkan peranan para pembuat program tersebut dalam melakukan sosialisasi mengenai program itu sendiri.

2. Tepat Sasaran

Di lihat dari bagaimana tujuan dari program tercapai atau berhasil tidaknya program tersebut terwujud.

3. Tepat waktu

Bagaimana dalam suatu kegiatan atau program dapat mengatur dan memanajemenkan waktu dalam pelaksanaan suatu program tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang ada terealisasikan dengan tepat atau bahkan bisa lebih cepat dari yang ditentukan atau juga sebaliknya.

4. Tercapainya Tujuan

Suatu program tentu dibuat dengan adanya tujuan yang hendak dicapai, bagaimana proses saat berjalannya suatu kegiatan itu dapat berjalan atau adanya kendala sehingga bisa menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan yang hendak dituju. Sehingga dalam hal diharapkan dapat memahami berbagai situasi dalam proses pencapaian tujuan agar tujuan dapat berjalan dengan sesuai dan dapat dirasakan hasilnya.

5. Perubahan Nyata

Sejauh mana program memberikan dampak atau hasil bagi peserta atau masyarakat. Dengan hal ini adanya perbedaan atau dampak yang dirasakan baik itu dari sasaran suatu kegiatan atau program maupun bagi pelaksana suatu kegiatan itu sendiri, apakah perubahan yang dirasakan dapat dirasakan.

Dari hal ini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kesesuaian tujuan awal yang telah direncanakan dengan hasil akhir yang didapat. Serta semakin besar usaha dalam proses pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau program maka semakin efektif kegiatan atau program tersebut. Hal ini berarti, dipentingkan dalam efektivitas adalah keberhasilan suatu tujuan dengan hasil akhir yang sesuai dengan yang direncanakan atau bahkan melebihi ekspektasinya.

### **C. Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen sangat penting baik bagi perusahaan maupun pemerintah untuk mengumpulkan, mendapatkan, mengolah suatu data menjadi sebuah informasi yang akan dimanfaatkan oleh organisasi untuk menunjang tugas organisasi. Surabri (2005:99) Berpendapat bahwa Sistem Informasi Manajemen modern merupakan kombinasi antara manusia yang mempunyai kemampuan dan komputer sebagai penunjang untuk menghasilkan sebuah informasi yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan sebuah keputusan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi.

Sistem informasi manajemen berusaha untuk menggabungkan keduanya dengan bertumpu pada norma organisasi dalam mendukung kegiatan organisasi. Dengan demikian, diharapkan sistem formal dapat menjadi subsistem, terutama keberhasilan organisasi bukan hanya perorangan melainkan hasil kerja sama seluruh organisasi. Selain struktur formal dan nonformal, struktur sistem informasi manajemen dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu input, proses, dan output. Akan tetapi, pada zaman sekarang ditambah satu bagian penting, yaitu penyimpanan. Penyimpanan atau database sangat penting karena dapat membuat data/informasi tersebut menjadi valid dan dapat digunakan untuk kemudian hari.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Sehingga alasan dari penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang ada dilapangan dalam penelitian untuk dapat menggali serta mendapatkan data mengenai program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya : observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, serta teknik analisis data peneliti menggunakan *Analysis Interactive Model. Miles dan Huberman* dengan beberapa langkah diantaranya : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti akan menyajikan data dan membahas hasil dari observasi dan wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, tim IT dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ini bagaimana pegawai yang menjalankan program ini sudah memahami apa itu SIPD, sudah berjalan sesuai prosedur yang ada, bagaimana BPKAD dapat melaksanakan program ini sudah mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dari program ini apakah sudah terlaksanakan dengan baik, adakah perubahan yang dirasakan saat sebelum dan sesudah penggunaan SIPD ini, atau malah sebaliknya belum mampu memahami penggunaan program SIPD.

## 1. Pemahaman Program

Kemampuan program adalah bagaimana pegawai bisa memahami dan dapat melaksanakan suatu program. Karena hal ini lah peneliti melakukan wawancara dengan tanya jawab langsung kepada informan mengenai pemahaman pegawai BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu terhadap program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah awal sebelum dapat memahami dan melaksanakan suatu program adalah dengan dilakukannya sosialisasi terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

*“Sosialisasi sudah dilakukan, dan juga dari youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bagaimana tutorial dan hal hal mengenai SIPD sehingga membantu dalam pemahaman terhadap program SIPD ini dan juga dari kabupaten lain terutama kabupaten di jawa yang di share ke youtube dari situ juga kita belajar.”* (wawancara dengan Sub Bidang Sosial Bapak Sevenpri, SE yang mewakilkan Kepala Bidang Anggaran).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi sudah dilakukan, di mulai dari PP Nomor 12 Tahun 2019 yang dipertegas oleh Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sudah diresmikan sudah mulai dilakukannya sosialisasi, untuk secara umum seluruh pegawai sudah mengetahui apa itu program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah namun dalam segi pemahaman dalam penggunaan aplikasi ini tidak semua pegawai dapat memahaminya karena hanya beberapa pegawai dan kepala badan atau dinas yang dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Walaupun terdapat kendala dalam sosialisasi karena pada masa pandemi tidak terlalu berdampak bagi BPKAD dalam memahami sosialisasi program SIPD, dengan adanya teknologi youtube juga membantu dalam pensosialisasian SIPD ini sehingga semakin banyak sumber agar pegawai BPKAD dapat memahami sistem serta prosedur yang ada dalam pada SIPD.

## 2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan bagaimana pelaksanaan program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dapat mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya yakni agar pengelolaan informasi daerah dapat dilakukan secara profesional, di mana dalam SIPD terintegrasi seluruh proses mulai dari perencanaan,



hingga pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kaitannya dengan penelitian ini untuk mencari tahu apakah program SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sudah tepat sasaran atau malah sebaliknya.

Mengenai ketepatan sasaran program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD masih dikatakan sudah dapat mencapai sasaran yang diinginkan, karena tujuan dari SIPD ini lebih efektifnya urusan pemerintahan daerah, lebih transparansinya kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah, efisiensi waktu yang dapat diminimalisir dengan adanya program SIPD ini sehingga pemantauan dari pusat dapat lebih mudah. Walau dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, itu bisa membuat para pegawai yang melaksanakan program SIPD ini lebih memahami dan mengerti sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat lebih menyeluruh atau bahkan bisa dikatakan sudah dapat dirasakan hasilnya

### **3. Tepat Waktu**

Bagaimana dalam pelaksanaan suatu program harus sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan agar proses yang ada dalam SIPD berjalan lancar dan maksimal, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ibrahim Alimimin, SKM, M.P.H Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu :

*“ Sekarang ini segala proses yang ada di SIPD dapat dikatakan sudah tepat waktu sudah sesuai jadwal yang ada, karena setiap kegiatan ada aturan yang mengatur jadwal yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mungkin waktu diawal pelaksanaan SIPD saja yang terkendala pencairan gaji karena adanya masalah pada SIPD sehingga kita harus mutar balik kembali segala prosesnya melalui SIMAKDA tapi sekarang sudah berjalan lancar”.*(Wawancara dengan Bapak Ibrahim Alimimin, SKM, M.P.H Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu).

Dari hal tersebut dapat dilihat dan dapat dikatakan segala suatu kegiatan yang ada di pemerintahan sudah ada jadwal yang ditentukan sebelumnya, sehingga sebisa mungkin pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kendala dalam pelaksanaan sehingga menjadikan hal ini hambatan dan membuat suatu kegiatan sedikit mundur dari jadwal yang ada sebelumnya.

Sarana dan prasarana yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan dalam pelaksanaan SIPD ini, BPKAD agar berjalan sesuai jadwalnya dan sasarannya sudah menyediakan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk digunakan diantaranya memiliki komputer yang masih bagus dan juga hampir diseluruh meja pegawai disediakan komputer, kemudian jaringan wifi yang tersedia, dan ruangan kerja yang nyaman

#### **4. Tercapainya Program**

Tercapainya tujuan program adalah tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi ataupun pemerintah dalam pelaksanaan suatu program, begitu juga dalam pelaksanaan program SIPD ini yang menginginkan informasi pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparansi, inovatif serta pemantauannya dapat dilakukan dari satu aplikasi saja.

Baik SIPD perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban memiliki suatu koneksi yang saling berhubungan, sehingga tetap adanya pengendalian dalam pelaksanaannya, karena saling berkaitan sehingga jika ada masalah pada salah satu bagiannya itu akan mempengaruhi bagian yang lainnya sehingga Kaban selaku BUD serta para kabid pada posisinya sebagai PPTK memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan SIPD pada masing masing bagiannya, tidak terkecuali pegawai yang mengisi SIPD itu sendiri.

Setiap kegiatan akan tetap ada pengawasan serta evaluasi yang akan diberikan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja selaku pembuat program, namun setiap pemegang pertanggung jawaban juga melakukan pengawasan terhadap tugas yang dimilikinya, seperti ketua IT yang memantau berjalannya setiap kegiatan SIPD penganggaran dan penatausahaan secara lancar dan sesuai dengan aturan yang ada, setiap kepala bidang juga akan bertanggung jawab mengawasi bagian tugasnya, begitu juga dengan kepala badan atau kepala dinas, kepala daerah, dan pemerintah pusat itu sendiri sehingga, dengan adanya pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kegiatan program SIPD kedepannya.

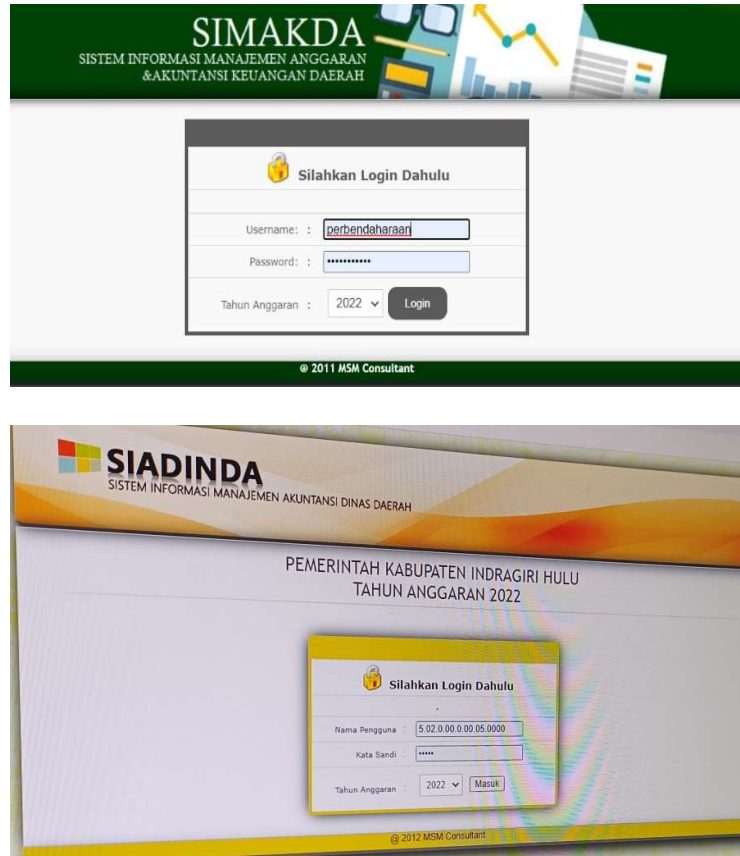
## **5. Perubahan Nyata**

Dimana suatu program mampu membuat suatu kemajuan, gebrakan baru, ataupun sesuatu yang terlihat perubahannya dari sebelumnya. Dengan adanya perubahan yang nyata dalam suatu program juga dapat melihat bagaimana pelaksanaannya berjalan dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya, jika sebaliknya tidak ada perubahan yang dirasakan maka program yang dilaksanakan belum berhasil ataupun tidak berhasil mencapai tujuannya.

*"Perubahan yang dirasakan, mungkin banyaknya pemangkasan kegiatan dan penyatuan seluruh proses yang ada dari situ sudah dapat dikatakan adanya perubahan, karena SIPD ini jika dimulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan 100% tanpa aplikasi pembantu sangat bagus, karena waktu bisa lebih efisien, pusat dapat memantau perkembangan pemerintahan daerah dari SIPD ini dan lebih transparansi".* (wawancara dengan Bapak Rahmad Alharawy ketua IT BPKAD).

Dari hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa tentu adanya perubahan yang dirasakan dengan sebelum penggunaan SIPD ini, SIPD ini lebih banyak memangkas kegiatan dari saat sebelum menggunakan SIPD, seperti perencanaan, penganggaran serta penatausahaan dalam pekerjaan dan pelaporannya masing masing, sekarang dalam satu aplikasi SIPD sudah terangkum segala kegiatan dimulai dari perencanaan hingga pelaporan tersedia, SIPD tidak lagi mengenal belanja langsung dan tidak langsung, karena yang ada seperti belanja pegawai, barang dan jasa dan lainnya, lebih mudah diawasi kegiatannya karena langsung terhubung ke pusat, lebih transparansi, lebih professional serta efisien.

Gambar 5.1 Aplikasi Pendamping SIPD



Sumber: BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu (2022)

Dapat dilihat bahwa perubahan pasti ada, karena tujuan dari pembuatan suatu program atau kegiatan tentunya menginginkan perubahan dari keadaan atau situasi sebelumnya, jika dulu berbagai proses kegiatan pemerintahan daerah memiliki masing-masing media atau aplikasinya sendiri seperti aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah) dan SIADINDA (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Dinas Daerah), yang penggunaannya hanya terbatas seperti SIMAKDA hanya bisa digunakan oleh BPKAD Indragiri Hulu saja sedangkan dinas lainya menggunakan SIADINDA, sehingga banyaknya pemangkasan kegiatan dan penyatuan seluruh proses kegiatan pemerintahan daerah pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) ini, yang sangat jelas perubahan yang dirasakan oleh para pegawai.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Melihat dari 5 indikator yang peneliti gunakan mengenai efektivitas program SIPD pada BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu dan berdasarkan hasil penelitian, 5 indikator ini saling memiliki keterkaitan dalam menentukan bagaimana pelaksanaan SIPD ini dilaksanakan dapat dikatakan pelaksanaan program SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup efektif dilaksanakan, karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu belum bisa sepenuhnya menggunakan SIPD dalam kegiatannya karena masih memerlukan aplikasi pendamping dalam beberapa prosesnya.

Sumber daya manusia yang belum dapat dikatakan baik, masih terjadi error jaringan saat penggunaan SIPD sehingga menghambat dalam penginputan, dan pada bagian pembuatan template juga sering terkendala, ada kegiatan yang belum bisa dilakukan menggunakan SIPD diantaranya pembuatan SP2D dan laporan penguji SP2D sehingga masih harus menggunakan SIMAKDA sebagai aplikasi pendamping kemudian saat ingin mendiskusikan kendala SIPD cukup sulit mendapatkan respon dari pusat mengingat program ini dilakukan seluruh Indonesia sehingga mendapatkan solusi atau arahan dari pusat sedikit sulit.

Dari hasil penelitian peneliti memiliki sedikit saran diantaranya :Pemerintah pusat dapat meningkatkan lagi Bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah karena masih cukup banyak kendala yang muncul didalam pelaksanaan aplikasi ini, serta memberikan inovasi dan peningkatan pada aplikasi SIPD itu sendiri agar tidak terjadi eror pada saat masuk aplikasi, penginputan template serta beberapa pembuatan pelaporan yang belum dapat dilakukan menggunakan SIPD, untuk BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditingkatkannya lagi pelatihan dan bimbingan teknis bagi setiap pegawai yang menggunakan SIPD karena masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan aplikasi ini. Dan dapat membuat sebuah forum atau diskusi yang dapat dilakukan secara berkala antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga dapat membahas kendala yang dihadapi agar mendapat solusi lebih cepat dan dapat juga menjadi tempat saling membantu dan memberikan masukan gar kedepannya pelaksanaan SIPD semakin meningkat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdurahmat, F. (2003). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persaba
- Arrijal, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Online Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*, 64-70.
- Firmansyah, A., & Mahardhika, B. w. (2018). *Penghantar Manajemen*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Hartono, S. (2018). *Manajemen Kinerja SDM (Teori dan aplikasi)*. Jakarta: Penerbit Luxima Metro Media.
- Hidayat, A. K. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam Melaksanakan Refocussing dan Relokasi Anggaran di BPKAD KOTA Ternate Provinsi Maluku Utara. *IPDN*, 2-8.
- Khristianto, W., Supriyanto, T., & Wahyuni, S. (2015). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (Pendekatan Sosioteknik)*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Krisnandi, H., Efendi, S., & Sugiono, E. (2019). *Penghantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Marlina. (2017). Efektivitas Sistem Perizinan Online dan Tracking Sistem (SPOTS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak. *Jom FISIP*, 2-9.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 3-6.
- Nurmansyah. (2018). *Sistem Informasi Manajemen Concept & Theory : Managerial Approach*. Rumbai : UNILAK PRESS.
- Nurusyifa, M. A. (2021, agustus 21). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro*. Retrieved oktober 02, 2021, from Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University: <http://etheses.uin-malang.ac.id/29903/>
- Ramdhadi, A., Rusdiana, & Irfan, M. (2014 ). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sari, E. (2007). *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi Mengelola Lingkungan melalui Penyesuaian Struktur Organisasi*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Utami, E., & Frinaldi, A. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sicantik di Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publi(JMIAP)*, 3(1), 22-30. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.215>

**Peraturan Pemerintah**

Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang “Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)”  
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 “ Pengelolaan Keuangan Daerah”

Pemendagri No. 77 Tahun 2020 tentang “Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”

Website Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) : <https://sipd.kemendagri.go.id/>